

BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA ,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diperlukannya penyesuaian terhadap ketentuan nilai sewa reklame, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Muna Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NO 42 TAHUN 2018 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Muna Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 42 TAHUN 2018
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR PEROLEHAN NILAI SEWA REKLAME

A. REKLAME PERMANENT

No.	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Obyek Pajak				Kelas Jalan	Nilai Strategis			
			1-4,99 M2	5-24,99 M2	>25 M2	14		1-4,99 M2	5-24,99 M2	>25 M2	
1	Reklame Megatron/Videotron/LED	Per Tahun	2,150,000	2,750,000	3,600,000	14	15	16	17		
2	Reklame Billboard a. Bandaw Jalan b. Billboard, Balho, Neon Box, Sign Board c. Papan Menempel	Per Tahun	500,000	650,000	750,000	A	300,000	400,000	500,000		
			350,000	550,000	650,000						
			250,000	300,000	400,000						
3	Reklame Berjalan a. Mobil b. Motor c. Gerobak	Per Tahun	200,000	250,000	300,000	C	150,000	200,000	350,000		
			100,000	100,000	200,000						
			50,000	75,000	100,000						

B. REKLAME INSIDEN/TIL

No.	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Obyek Pajak			Kelas Jalan	Nilai Strategis			
			Luas Bidang (Rp/M2)	11	12		13	14	15	16
1	2	3	1-4,99 M2	5-24,99 M2	>25 M2		1-4,99 M2	5-24,99 M2	>25 M2	
1	Reklame Megatron/Videotron/LED	Per Bulan	200,000	250,000	300,000	A	60,000	70,000	80,000	
2	Reklame Billboard a. Badan Jalan b. Billboard, Balho, Neon Box, Sign Board c. Papan Menempel	Per Bulan	80,000	100,000	130,000	B	50,000	60,000	70,000	
			100,000	110,000	120,000					
			100,000	110,000	120,000					
3	Reklame Berjalan Spanduk/Umbul-Umbul/T-Banner	Per Bulan	60,000	70,000	80,000					
4	Reklame Melekat/Suker/Brosur/Leaflet	Per Bulan/Lbr	40,000							
5	Reklame Film/Slide	Per Jam	20,000	30,000	40,000					
6	Reklame Suara	Per Jam	15,000	20,000	25,000	C	40,000	50,000	60,000	
7	Reklame Udara	Per Hari	100,000	150,000	200,000					
8	Reklame Peragaan	1x Peragaan	1,000,000	1,500,000	2,000,000					

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MUNA

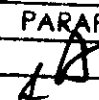
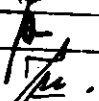


L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ALIBASA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR. 8

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/IGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAPENDA	